

RENCANA KERJA TAHUN 2019



DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANAHAN TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan	23
2.4. Revisi terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan	32
3.3. Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN	39
BAB V PENUTUP	49

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang dituang dalam bentuk dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun mendatang. Rencana Kerja merupakan penjabaran tahunan Renstra dan masukan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum PD dan Musrenbang Kota Batam.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diserahkannya beberapa kewenangan pusat kedaerah melalui Kepres No 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, maka Pemerintah Kota Batam membentuk Dinas Pertanahan Kota Batam yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam. Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan peraturan tersebut maka disusunlah program kerja dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Batam yang tersusun dari Rencana Kerja (Renja) dalam hal ini Dinas Pertanahan Kota Batam. Program atau kegiatan yang ada diharapkan dapat memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam bidang

pertanahan. Dengan program tersebut diharapkan seluruh komponen baik pegawai maupun pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-program Dinas Pertanahan serta hasil yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang. Wujud pembangunan tersebut diaktualisasikan dalam bentuk program kerja tahunan yang diimplementasikan dalam bentuk Renja Dinas Pertanahan Kota Batam.

Bahwa tingkat keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan dan pembangunan di daerah ditentukan oleh tingkat kualitas perencanaannya, hal ini disebabkan perencanaan tersebut menentukan langkah daerah untuk menghadapi masa depan dengan antisipasi dan tindakan yang tepat. Hasil yang telah dicapai pada Dinas Pertanahan diantaranya dapat memberikan sumbangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Untuk itu perlu di susun suatu Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam, yang meliputi kebijakan Pemerintah dan Anggaran termasuk di dalamnya Perencanaan, Pengawasan dan Monitoring serta pemasukan sumber daya keuangan dalam jangka waktu satu tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini menggunakan landasan peraturan perundangan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi, dan Kota Batam (lembaran negara nomor 107 dan tambahan lembaran negara RI nomor 4833);

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 11) Keputusan Presiden No 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
- 12) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



- 14) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
- 16) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;
- 17) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam;
- 18) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
- 19) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
- 20) Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sebagaimana telah ditargetkan dalam perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanahan.

B. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun oleh Dinas Pertanahan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanahan di tahun 2019;
2. Memberikan acuan, tolok ukur dan instrumen bagi Dinas Pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan dinas sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;
3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pertanahan agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pertanahan terdiri dari 5 (lima) bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja, serta sistematika penulisan
- Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun Lalu, berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pertanahan tahun lalu dan capaian rencana strategis Dinas Pertanahan, analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanahan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

- Bab III : Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan, serta program dan kegiatan.
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanahan.
- Bab V : Penutup, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



B A B II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANAHAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Tahun 2016 merupakan tahun transisi pelaksanaan kegiatan dan program rencana strategis tahun 2011-2016 dan rencana strategis 2016-2021, sedangkan tahun 2017 dan tahun 2018 merupakan tahun pertama dan tahun kedua pelaksanaan kegiatan dan program rencana strategis tahun 2016-2021.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan tahun 2018 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017 dan tahun 2018. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana kerja adalah mencakup pelaksanaan 5 (lima) kegiatan teknis DPA-SKPD dan 2 (dua) kegiatan rutin (EX BAU) sebagai kegiatan pendukung.



Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2016, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan (dulunya Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Daerah Kota Batam), dalam APBD dan APBD Perubahan Kota Batam tahun 2016 sebesar Rp 1.462.485.990,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 771.175.990,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan 4 (empat) kegiatan teknis sebesar Rp. 691.310.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.218.496.186,- atau 83,32%,- dan realisasi fisik sebesar 94,26%.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2017, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam dalam APBD dan APBD Perubahan Kota Batam tahun 2017 sebesar Rp 1.589.110.600,- (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 1.003.510.600,- (satu milyar tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) dan 4 (empat) kegiatan teknis sebesar Rp. 585.600.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.300.516.573,- atau 81,83%,- dan realisasi fisik sebesar 87,42%.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2018, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam dalam APBD Kota Batam tahun 2018 sebesar Rp 1.408.239.465,- (satu

milyar empat ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 7 (tujuh) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 726.894.465,- (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dan 5 (lima) kegiatan teknis sebesar Rp. 681.345.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima rupiah).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada tahun 2016 dianggarkan Rp. 596.927.990,- Realisasi keuangan adalah Rp. 456.428.186,- atau 76,46% dan realisasi fisik 93,54%. Pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 679.192.600,- Realisasi keuangan adalah Rp. 580.506.333,- atau 85,47% dan realisasi fisik 88,00%. Sedangkan pada tahun 2018 dianggarkan Rp. 580.687.365,-.
- b. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 174.248.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 155.191.000,- atau 89,06% dan realisasi fisik 100,00%. Sedangkan pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 324.318.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 259.474.400,- atau 80,01% dan realisasi fisik 99,19%. Sedangkan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 146.207.100,-.

- c. Program Penataan Tata Guna Tanah meliputi 3 (tiga) kegiatan pada tahun 2016 dan 4 (empat) kegiatan tahun 2017, yaitu:
1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam, pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 62.750.000,- Realisasi keuangan adalah 17.425.000,- atau 27,77% dan realisasi fisik 27,77%. Pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 1.713.840,- atau 3,43% dan realisasi fisik 3,43%. Sedangkan tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 325.000.000,-.
 2. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Fasilitas Rumah Ibadah di Kota Batam pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 310.090.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 297.265.000,- atau 95,86% dan realisasi fisik 100,00%. Dan dilanjutkan pada tahun 2017 melalui kegiatan Identifikasi dan inventarisasi lahan aset pemerintah dengan anggaran sebesar Rp. 145.010.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 143.370.000,- atau 98,87% dan realisasi fisik 100,00%. Pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,-.
 3. Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat Perkampungan Tua, pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 212.410.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 202.048.200,- atau 95,12% dan realisasi fisik 100,00%. Dan dilanjutkan pada tahun 2017 melalui kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua dengan anggaran sebesar Rp. 217.220.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 214.820.000,- atau 98,90% dan realisasi fisik 100,00%. Pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 45.045.000,-.
 4. Kegiatan Fasilitas Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dengan anggaran Rp. 173.370.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 100.630.000,- atau 58,04% dan realisasi fisik 61,10%. Dilanjutkan di tahun 2018 dengan anggaran Rp. 111.300.000,-.

5. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2018 dengan anggaran Rp. 100.000.000,-
- d. Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan meliputi 1 (satu) kegiatan pada tahun 2016, yaitu Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan, pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 106.060.000,- Realisasi keuangan adalah 90.138.800,- atau 84,99 dan realisasi fisik 100,00%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Pertanahan dan pencapaian Renstra Dinas Pertanahan sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian s/d Tahun 2018 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

Lembar : 1

Kode	Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (7/6))	(9)	(10 (5+7+9))	(11 = (10/4))
2	Usan Wajib Non Pelayanan Dasar									
2	Bidang/Usuran Pertanian									
2	10 Program Penataan Tata Guna Tanah	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	-	17,43%	26,46%	26,46%	100,00%	35,66%	35,66%	35,66%
2	10 01 Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Persentase sertifikasi tanah aset Pemko Batam	36,98%	31,27%	31,59%	31,59%	100,00%	32,22%	32,22%	32,22%
2	10 02 Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi	100,00%	31,75%	47,62%	47,62%	100,00%	71,43%	71,43%	71,43%

Lembar : 2

Kode	Usan/Bidang Usan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (7/6))	(9)	(10 (5+7+9))	(11 = (10/4))
2 10 43 03	Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat Perkampungan Tua dan Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua	Persentase pengadaaan PL kampung tua	44,12%	20,59%	23,53%	23,53%	100,00%	23,53%	23,53%	23,53%
2 10 43 04	Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Persentase sertifikasi lahan masyarakat	100%	-	20,00%	20,00%	100,00%	40,00%	40,00%	40,00%
2 10 43	Program Penataan Tata Guna Tanah	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	100%	-	-	-	-	26,00%	26,00%	26,00%
2 10 43 05	Kegiatan Pengadaaan Lahan Aset Pemko Batam	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	100%	-	-	-	-	26,00%	26,00%	26,00%

Penjelasan secara rinci dari masing-masing kegiatan pada tabel 2.1. diatas adalah sebagai berikut:

1. *Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam*

Indikator kinerja kegiatan pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam ini adalah jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam, dengan target kegiatan 630 persil selama periode tahun 2016-2021. Realisasi sampai dengan tahun 2016 adalah 197 dokumen, dan pada tahun 2017 dan 2018 realisasi kegiatan masing-masing 2 dokumen dan 5 dokumen.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengajuan permohonan lahan kepada Otorita Batam untuk mendapatkan penetapan lokasi (PL) atas nama Pemerintah Kota Batam yang akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Setelah ditetapkannya PL atas nama Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Batam (melalui Dinas Pertanahan) mengajukan permohonan sertifikasi lahan kepada Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN). Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola lahan di Pulau Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sertifikasi lahan.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan restrukturisasi organisasi di BP Batam dan belum selesainya penertiban administrasi dokumen lahan di BP Batam menyebabkan pengurusan dokumen pendukung untuk pengurusan sertifikat seperti Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP) dan Rekomendasi BP Batam belum selesai, hal tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk pengajuan permohonan sertifikat lahan ke BPN.

2. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah

Indikator kinerja kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah adalah persentase data lahan aset Pemerintah Kota Batam yang diinventarisasi sebesar 47,62%, dengan jumlah lahan aset Pemerintah Kota Batam keseluruhan diperkirakan sebesar 630 persil. Sampai dengan tahun 2016 telah diinventarisasi lahan aset pemerintah dan telah diinput di aplikasi database lahan aset pemerintah sebanyak 200 persil. Sampai dengan tahun 2017 capaian kegiatan sebesar 47,62% telah diinventarisasi lahan aset pemerintah dan telah diinput di aplikasi database lahan aset pemerintah sebanyak 300 persil, dan diperkirakan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 adalah 450 persil (71,43%). Realisasi kegiatan sampai dengan tahun 2018 adalah telah diinventarisasi lahan aset pemerintah dan telah diinput di aplikasi database lahan aset pemerintah sebanyak 450 persil lahan aset atau sama dengan 71,43% sesuai dengan target kegiatan.

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah meliputi lahan-lahan aset pemerintah seperti perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang kemudian dikenal dengan istilah prasarana sarana utilitas (PSU), yang tersebar di wilayah Kelurahan lingkup Kecamatan wilayah mainland Kota Batam.

Kebutuhan akan kesamaan data dan informasi, terutama data spasial Kota Batam, pada tahun 2017 ini Dinas Pertanahan juga akan melakukan inventarisasi dan integrasi data spasial Kota Batam dalam rangka menuju *One Map Policy*. Untuk tahap awal kemungkinan data spasial yang diintegrasikan terbatas hanya pada beberapa tema saja, antara lain peta dasar, peta administrasi kota Batam, peta jaringan jalan, peta rtrw kota, dan peta sebaran aset lahan pemko Batam.

Melalui kegiatan inventarisasi ini diharapkan kedepan pemerintah Kota Batam memiliki database pertanahan, sehingga terciptanya tertib administrasi bidang pertanahan di Kota Batam. Salah satu wujud nyata dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan adalah dengan jalan pengendalian dalam penggunaan dan kepemilikan tanah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepemilikan dan penggunaan tanah fasos tersebut menjadi lebih jelas. Hal ini dapat menjaga agar fungsi dari tanah yang bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya, dimana kepemilikan lahan tersebut adalah Pemerintah Kota sebagai lembaga yang mengatur tentang penggunaan lahan tersebut.

Dengan terdokumentasikannya seluruh aset pemerintah Kota Batam, terutama untuk keperluan fasilitas umum dan fasilitas sosial, diharapkan pada akhirnya peran Pemerintah Kota Batam dalam mengatur dan menyediakan lahan-lahan fasilitas sosial dapat berjalan dan lahan-lahan tersebut dapat dikelola dengan baik serta bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya.

3. Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat Perkampungan Tua dan Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Kegiatan penyelesaian permasalahan batas kampung tua telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Pada tahun 2015 dan 2016 telah dilakukan kegiatan inventarisasi lahan masyarakat perkampungan tua di 34 lokasi kampung tua Kota Batam. Selain itu telah dilaksanakan juga kegiatan pemasangan patok batas kampung tua yang telah dilaksanakan di 7 (tujuh) kampung tua di tahun 2014, dilanjutkan di tahun 2015 dengan realisasi sebanyak 15 kampung dari target 15 kampung. Lokasi kegiatan meliputi: (1) Kampung Tiawangkang di Kecamatan Sagulung, (2) Kampung Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, (3) Kampung Tereh di Kecamatan Nongsa, (4) Kampung Bakau Serip di Kecamatan Nongsa, (5) Kampung Teluk Lunggu

di Kecamatan Nongsa, (6) Kampung Bagan di Kecamatan Sei Beduk, (7) Kampung Piayu Laut di Kecamatan Sei Beduk, (8) Kampung Teluk Mata Ikan di Kecamatan Nongsa, (9) Kampung Patam Lestari di Kecamatan Sekupang, (10) Kampung Dapur 12 di Kecamatan Sagulung, (11) Kampung Tembesi di Kecamatan Sagulung, (12) Kampung Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa, (13) Kampung Batu Merah di Kecamatan Batu Ampar, (14) Kampung Sei Tering di Kecamatan Batu Ampar, dan (15) Kampung Setenggar di Kecamatan Sei Beduk.

Kondisi sampai dengan tahun 2016, telah ditanda tangani 7 (tujuh) Berita Acara Kesepakatan antara pihak terkait (Pemko Batam, BP Batam, dan RKWB) dan telah ditetapkan PL nya, yang meliputi lokasi (1) Kampung Tua Nongsa Pantai, (2) Kampung Tua Batu Besar, (3) Kampung Tua Kampung Panau, (4) Kampung Tua Tanjung Riau, (5) Kampung Tua Cunting, (6) Kampung Tua Sei Binti, dan (7) Kampung Tua Sei Lekop.

Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua dengan indikator kinerja berupa jumlah dokumen PL kampung Tua, yang selama periode tahun 2016-2021 ditargetkan 34 kampung tua diterbitkan dokumen PL atas nama Pemko Batam.

Pada tahun 2017, ditargetkan akan diterbitkan 8 PL kampung tua dengan lokasi (1) Kampung Tua Tanjung Gundap, (2) Kampung Tua Tiawangkang, (3) Kampung Tua Tereh, (4) Kampung Tua Bakau Serip, (5) Kampung Tua Patam Lestari, (6) Kampung Tua Dapur 12, (7) Kampung Tua Teluk Lunggu, dan (8) Kampung Tua Piayu Laut, dan sampai dengan saat ini baru terbit 1 (satu) surat keterangan dari BP Batam untuk diterbitkan PL di Kampung Tua Bakau Serip. Sampai dengan tahun 2017 capaian kinerja kegiatan adalah 8 Kampung Tua diterbitkan dokumen PL atas Pemko Batam dari 15 kampung tua yang ditargetkan.

Sedangkan untuk kegiatan penataan kampung tua pada tahun 2018 dilaksanakan dengan swakelola (tanpa anggaran) duna efisiensi dan rasionalisasi APBD tahun 2018.

4. Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat

Indikator kinerja kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat adalah jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat, dengan target kegiatan 500 persil selama periode tahun 2016-2021. Pada tahun 2017 telah terealisasi pengurusan dokumen sertifikat lahan masyarakat sebanyak 100 persil, dan perkiraan capaian kinerja kegiatan sampai dengan tahun 2018 adalah 200 persil sertifikat lahan masyarakat

Kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat atau disebut juga dengan PRODA, merupakan kegiatan daerah untuk mendukung program PRONA Badan Pertanahan Nasional RI.

PRONA merupakan singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan legalisasi aset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjukasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara masal.

Kegiatan PRODA/PRONA ini dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Tujuan kegiatan PRODA/PRONA ini adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah, serta salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah.

Rangkaian kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat pada tahun 2018 adalah (1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme dari PRODA, (2) Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan lokus (Kelurahan Tanjung Sari, Kelurahan Bulang Lintang, Kelurahan Pecong, dan Kelurahan Sekanak Raya), (3) Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PRODA, (4) Inventarisasi lahan masyarakat dengan melibatkan pihak konsultasi, (5) bersama2 dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) melakukan survey dan pengukuran lokasi PRODA, dan (6) Pendaftaran berkas PRODA ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

5. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Kegiatan pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana prasarana di Kota Batam, sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 sebanyak 50 persil lahan untuk pembangunan, sekolah, puskesmas/puskesmas pembantu, kantor dinas/instansi pemerintah kota, rusunawa, pemakaman, tps, dan lain-lain.

Rangkaian kegiatan pengadaan lahan aset Pemko Batam pada tahun 2018 adalah (1) Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan, dll terkait dengan kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah, (2) Koordinasi dengan BP Batam terkait pengalokasian atas kebutuhan lahan aset Pemko Batam, (3) Survey dan Pengukuran Lapangan, (4) Pengusulan pengadaan lahan aset ke BP Batam.

Indikator kinerja kegiatan pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam ini adalah jumlah pengadaan lahan aset Pemko Batam, dengan target kegiatan 50 persil selama periode tahun 2016-2021.

Kegiatan pengadaan lahan aset pemerintah kota Batam ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dengan perkiraan capaian kegiatan adalah 13 persil.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan

Dinas Pertanahan Kota Batam dahulunya Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Daerah Kota Batam, yang telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasi, dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014, dan terakhir melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, terbentuknya Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Batam di Bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Indikator kinerja sasaran Dinas Pertanahan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2011-2016 ada 2 (dua) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, yaitu: (1) Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam, dan (2) Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal.

Pencapaian kinerja pelayanan (kegiatan) Dinas Pertanahan diuraikan sebagaimana tabel 2.2.1 berikut:

Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam

NO	Indikator Sasaran	Indikator Program	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	-	26,00 %	46,00 %	-	-	26,00 %	46,00 %	Tercapai	
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	-	-	17,43 %	26,46 %	35,66 %	45,40 %	17,43 %	26,46 %	35,66 %	45,40 %	Tercapai

Indikator kinerja pertama berupa persentase ketersediaan lahan aset pemerintah Kota Batam, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 100%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan tersedianya lahan aset pemko Batam sebanyak 50 persil. Kegiatan ini baru akan dimulai pada tahun 2018 dengan proyeksi capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 26,00%, yaitu 13 persil lahan aset. Hambatan dan kendala antara lain dokumen pendukung untuk pengurusan sertifikat seperti Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP) dan Rekomendasi BP Batam belum selesai, terbatasnya tenaga teknis, kesulitan dalam penyesuaian jadwal pengukuran di lapangan dengan instansi terkait, yaitu BP Batam dan Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, dan keterbatasan waktu pengurusan.

Indikator kinerja kedua berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 36,98%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan terlaksananya sertifikasi lahan aset Pemko Batam sebanyak 233 persil dari 630 persil lahan aset yang ada, dan terlaksananya sertifikasi lahan masyarakat sebanyak 500 persil. Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 26,46%, yang terdiri dari 197 dokumen sertifikat lahan aset pemko dan 100 dokumen sertifikat lahan masyarakat. Realisasi sampai dengan tahun 2018 adalah 35,66%, yaitu 204 dokumen sertifikat lahan aset dan 200 dokumen sertifikat lahan masyarakat.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan

Permasalahan atau isu yang dihadapi pada Dinas Pertanahan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan lahan untuk kegiatan pembangunan Kota Batam, seperti pendidikan, kesehatan, perkantoran pemerintah, rusunawa, olahraga, persampahan (tps), dan pemakaman.
2. Penerapan SK Walikota Batam nomor 105/HK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam masih sulit dilaksanakan karena pada sebagian lokasi belum disepakatinya luasan perkampungan tua dengan BP Kawasan.
3. Kampung tua yang memiliki potensi yang besar belum dikelola secara baik yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat setempat.
4. Masalah yang dihadapi diperkotaan antara lain ; Penyerobotan tanah negara oleh masyarakat dijadikan rumah liar, Ganti rugi tanah yang belum memadai, Ganti rugi tanah berkali-kali atas tanah yang sama, Inventarisasi kepemilikan lahan belum terdata seluruhnya, Terbatasnya lahan yang dimanfaatkan untuk fasum dan fasos, banyaknya lahan fasum dan fasos yang belum diserahkan oleh BP Batam atau pengembang kepada Pemerintah Kota Batam.
5. Sebagian besar lahan aset Pemerintah Kota Batam belum memiliki dokumen legalitas lahan.
6. Masalah yang dihadapi didaerah Hinterland antara lain; kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak kepemilikan tanah / sertifikasi, masih banyak pulau – pulau di hinterland yang belum diukur untuk titik batasnya (koordinat).
7. Masih banyaknya lahan masyarakat yang belum memiliki dokumentasi legalitas lahan sehingga rawan konflik.
8. Kurangnya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan tanah.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan/isu-isu yang dihadapi :

1. Adanya payung hukum yang jelas dan aturan pelaksanaannya, serta penegakan hukum yang pasti.
2. Koordinasi dengan BP Batam terkait kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan di Kota Batam.
3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya kepemilikan hak atas tanah.
4. Sosialisasi mengenai peraturan pertanahan berkenaan dengan status lahan kampung tua.
5. Sertifikasi lahan aset pemerintah.
6. Penertiban atas kepemilikan tanah diatas tanah negara.
7. Adanya database dan sistem informasi pertanahan Kota Batam.
8. Penyelesaian penetapan PL Kampung Tua dan Penataan Lahan kampung tua.
9. Fasilitasi sertifikasi lahan masyarakat.
10. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan.

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun hasil revidi terhadap rancangan awal RKPD pada Dinas Pertanahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Dinas Pertanahan Kota Batam

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
I.	Program Penataan Tata Guna Tanah					Program Penataan Tata Guna Tanah					
1.	Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Batam	Persentase sertifikasi tanah aset Pemko Batam	33,81%	315.000.000	Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Batam	Persentase sertifikasi tanah aset Pemko Batam	33,81%	252.000.000	Penyesuaian dg luasan lahan aset
2.	Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	Batam	Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi	100,00%	125.000.000	Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	Batam	Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi	100,00%	50.000.000	Updating database dilaksanakan secara swakelola
3.	Kegiatan Fasilitas Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Batam	Persentase sertifikasi lahan masyarakat	60,00%	206.300.000	Kegiatan Fasilitas Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Batam	Persentase sertifikasi lahan masyarakat	60,00%	168.300.000	Proda hanya untuk persil 200
4.	Kegiatan Penataan Lahan Kampung tua	Batam	Persentase pengadaan PL kampung tua	44,12%	60.445.000	Kegiatan Penataan Lahan Kampung tua	Batam	Persentase pengadaan PL kampung tua	44,12%	27.137.500	Efisiensi biaya konsumsi rapat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
5.	Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Batam	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	46,00%	150.000.000	Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Batam	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	46,00%	50.000.000	Biaya survey dan pengukuran
II	Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah (Rutin/Ex-Bau)					Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah (Rutin/Ex-Bau)					
1.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	Tersedianya sarana administrasi perkantoran	1 Tahun	648.526.405,17	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	Tersedianya sarana administrasi perkantoran	1 Tahun	558.577.057,5	
III	Program Pembangunan Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran					Program Pembangunan Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran					
1.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur	Batam	Tersedianya sarana dan presarana aparatur	1 Tahun	330.010.000	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur	Batam	Tersedianya sarana dan presarana aparatur	1 Tahun	130.010.000	

Adapun rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2019 hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD pada Dinas Pertanahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.2 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2019 Hasil Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Batam

Nama OPD : Dinas Pertanahan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan
I.	Program Penataan Tata Guna Tanah						
1.	Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Batam	Persentase sertifikasi tanah aset Pemko Batam	33,81%	252.000.000	APBD II	Penyesuaian dg luasan lahan aset
2.	Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	Batam	Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi	100,00%	50.000.000	APBD II	Updating database dilaksanakan secara swakelola
3.	Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Batam	Persentase sertifikasi lahan masyarakat	60,00%	168.300.000	APBD II	
4.	Kegiatan Penataan Lahan Kampung tua	Batam	Persentase pengadaan PL kampung tua	44,12%	27.137.500	APBD II	
5.	Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Batam	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	46,00%	50.000.000	APBD II	Biaya survey dan pengukuran
II.	Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah (Rutin/Ex-Bau)						
6.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	Tersedianya sarana administrasi perkantoran	1 Tahun	558.577.057,5	APBD II	
III.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
7.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	130.010.000	APBD II	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tingkat Kelurahan di Kota Batam Batam adalah sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
I	Program Penataan Tata Guna Tanah				
1.	Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Kel. Sekanak Raya	Sertifikat Tanah (Prona/Proda)	100 bidang	Tidak menjadi prioritas kelurahan
		Kel. Pecong	Sertifikat Tanah (Prona/Proda)	50 bidang	Tidak menjadi prioritas kelurahan
		Pulau cengkui dan Jaloh	Sertifikat Tanah (Prona/Proda)	75 bidang	Tidak menjadi prioritas kelurahan
		Kampung Tengah RT 03 RW 01 Kelurahan Pemping	Sertifikat Tanah (Prona/Proda)	50 bidang	Tidak menjadi prioritas kelurahan
		Kel. Tanjung Sari	Sertifikat Tanah (Prona/Proda)	200 bidang	Prioritas (diajukan)
		Pemakaman Umum Lingkungan RT.004/RW. 001	Sertifikat Tanah (Prona/Proda)	1 bidang	Tidak menjadi prioritas kelurahan
		Pulau Panjang	Sertifikat Tanah (Prona/Proda)	200 bidang	Tidak menjadi prioritas kelurahan
		selat nenek, temoyong dan pulau aweng	Sertifikat Tanah (Prona/Proda)	75 bidang	Tidak menjadi prioritas kelurahan
2.	Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua	Kampung Tua Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar	Pemetaan Lahan Kampung Tua Batu Merah, Kampung Tua Batu Merah RW. 07 RT. 23	1 Titik	Reses Dewan
		Kampung Tua Batu Merah RW. 07 RT. 23, Kel. Batu Merah/Kec. Batu Ampar	Menuntut Hak atas kewenangan BP Batam, di Kampung Tua Batu Merah RW. 07 RT. 23, Lahan Kampung Tua Batu Merah	1 Titik	Reses Dewan

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat di bidang pertanahan diatas sebagian besar tidak menjadi prioritas kelurahan, sehingga usulan tersebut tidak diusulkan lagi pada pelaksanaan Musrenbangda Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang ditindaklanjuti pada pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
I	Program Penataan Tata Guna Tanah				
1.	Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Kel. Tanjung Sari	Sertifikat Tanah (Prona/Proda)	200 bidang	Prioritas (diajukan)
2.	Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua	Kampung Tua Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar	Pemetaan Lahan Kampung Tua Batu Merah, Kampung Tua Batu Merah RW. 07 RT. 23	1 Titik	Reses Dewan
		Kampung Tua Batu Merah RW. 07 RT. 23, Kel. Batu Merah/Kec. Batu Ampar	Menuntut Hak atas kewenangan BP Batam, di Kampung Tua Batu Merah RW. 07 RT. 23, Lahan Kampung Tua Batu Merah	1 Titik	Reses Dewan

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI 2015 -2019 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019, maka sasaran strategis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepastian Hukum Hak atas Tanah
2. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
4. Meningkatnya pelayanan pertanahan.

Untuk mencapai sasaran dimaksud, arah kebijakan yang ditetapkan dalam pembangunan di bidang pertanahan nasional adalah:

1. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif
2. Reforma Agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat
3. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4. Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan

Berkaitan dengan visi, misi, dan arah kebijakan BPN RI tahun 2015-2019 diatas, dengan memperhatikan kewenangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemerintah Daerah, maka Dinas Pertanahan menyusun program dan kegiatan yang mendukung kebijakan

tersebut, yaitu pengadaan lahan untuk pembangunan sarana prasarana, serta pengadaan dokumen lahan baik lahan aset pemerintah maupun lahan masyarakat (proda) untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 yang telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017, dalam kurun waktu perencanaan tersebut pengembangan wilayah, pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut. Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman kota, dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30% dari luas wilayah darat kota, mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai, serta mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka disusunlah Visi Kota Batam Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan secara maksimal. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas. Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Kota Batam telah menetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah.

Untuk Dinas Pertanahan Kota Batam termasuk kedalam misi ke-1 (kesatu), yaitu:

Misi 1 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Mengayomi

Tujuan strategik ditetapkan dengan merumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mencapai visi dan misi. Tujuan strategik merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka telah dirumuskan tujuan Pemerintah Kota Batam periode tahun 2016 – 2021. Adapun tujuan yang harus dicapai Pemerintah Kota Batam terkait dengan Tupoksi Dinas Pertanahan Kota Batam adalah *Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat.*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam jangka pendek (tahunan, semesteran atau bulanan). Sedangkan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Batam terkait dengan pembangunan bidang pertanahan periode tahun 2016-2021 adalah meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dengan indikator kinerja sasaran persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang dijabarkan dalam RPJM Kota Batam tahun 2016-2021 yang terkait dengan urusan pertanahan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Tahun 2019
1	Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	46,00%
				Persentase lahan aset Pemko dan lahan masyarakat yang berstatus legal	45,40%

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang dirumuskan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dalam hal ini 1 (satu) tahun yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Kebutuhan dana Dinas Pertanahan Tahun 2019 untuk mendukung tugas pokok dan fungsi instansi serta untuk mencapai target kinerja kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana strategis Dinas Pertanahan tahun 2016-2021 adalah sebesar Rp. 1.236.024.557,50 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh sen).

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2019 yang pembiayaannya melalui APBD Kota Batam dengan mengacu capaian renstra Dinas Pertanahan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Tata Guna Tanah

Melalui Program Tata Guna Tanah diharapkan terjadi peningkatan penataan tata guna tanah di Kota Batam.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini adalah:

- a. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam
- b. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah

- c. Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat
- d. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua
- e. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam

2. Program Pendukung

Program pendukung di Dinas Pertanahan Kota Batam meliputi 2 (dua) program sebagai berikut:

- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, yaitu Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Tabel 3.3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Tahun 2019 dan Prakiraan Rencana Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota Batam

Kode	Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
2	Bidang/Urusan Pertanahan								
2	10 43 Program Penataan Tata Guna Tanah	Persentase lahan aset Penko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal.							
2	10 43 01 Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Persentase sertifikat tanah aset Penko Batam	Batam	33,81% (213 persil)	68.000.000	APBD Kota Batam		35,40% (23 persil)	225.000.000,-
2	10 43 02 Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	Persentase data lahan aset Penko Batam yang diinventarisasi	Batam	100,00% (630 persil)	47.600.000	APBD Kota Batam		100,00% (750 persil)	100.000.000,-
2	10 43 03 Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat Perkampungan Tua dan Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua	Persentase pengadaan PL kampung tua	Batam	44,12% (15 Kampung Tua)	-	APBD Kota Batam		44,12% (15 Kampung Tua)	-
2	10 43 04 Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Persentase sertifikat lahan masyarakat	Batam	60,00% (300 Dokumen)	107.900.000	APBD Kota Batam		80,00% (400 Dokumen)	200.000.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	10 43	Program Penataan Tata Guna Tanah		46,00% (23 persil)					
2	10 43 05	Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Batam	46,00% (23 persil)	49.400.000	APBD Kota Batam		98 Persil	100.000.000,-
4	0	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan							
4	0 1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran							
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	100 %	471.115.662,82	APBD Kota Batam		100 %	650.000.000,-
4	0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
		Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	100 %	112.029.475,00	APBD Kota Batam		100 %	330.000.000,-

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN

Rincian kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2019 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Tata Guna Hutan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2011. Berdasarkan Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021, target capaian program untuk kegiatan ini adalah jumlah pengadaan dokumen sertifikat tanah aset Pemko Batam sebanyak 233 dokumen dari 630 persil lahan aset pemko Batam (berdasarkan data base tahun 2016).

Kegiatan pengadaan dokumen lahan aset pemerintah Kota Batam ini dilaksanakan dengan cara menginventarisasi kelengkapan administrasi lahan aset Pemko Batam yang meliputi dokumen PL, SPJ skeep, rekomendasi, dan sertifikat lahan. Untuk lahan aset yang terdata tidak memiliki dokumen PL, SPJ Skeep dan Rekomendasi akan dilakukan pengajuan/pengusulan dokumen dimaksud ke BP Batam. Sedangkan untuk lahan yang sudah memiliki kelengkapan dokumen PL, SPJ skeep dan rekomendasi selanjutnya akan dilakukan pengusulan/pengurusan dokumen sertifikat lahan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN). Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola lahan di Pulau Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sertifikasi

lahan.

Rincian rencana kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah tahun 2019 sebagai berikut :

Input	:	Rp. 68.000.000,-
Output	:	Jumlah dokumen PL/sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam 20 Persil
Outcome	:	Persentase pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam 33,81 persen
Benefit	:	Tersedia data-data lahan yang memudahkan dalam perencanaan pembangunan
Impact	:	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

b. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari periode pembangunan Kota Batam tahun 2011-2016, dimana sampai dengan tahun 2016 (data awal) telah diinventarisasi lahan aset Pemko Batam sebanyak 200 persil dari 630 persil lahan aset Pemko Batam. Pada periode 5 (lima) tahun kedepan, tahun 2016-2021, diharapkan seluruh lahan aset Pemerintah Kota Batam dengan jumlah 630 persil (berdasarkan data base tahun 2016) telah diinventarisasi lokasi dan luasannya.

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah meliputi lahan-lahan aset pemerintah seperti perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang kemudian dikenal dengan istilah prasarana sarana utilitas (PSU), yang tersebar di wilayah Kelurahan lingkup Kecamatan wilayah mainland Kota Batam.

Melalui kegiatan inventarisasi ini diharapkan kedepan pemerintah Kota Batam memiliki database pertanahan, sehingga terciptanya tertib administrasi bidang pertanahan di Kota Batam. Salah satu wujud nyata

dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan adalah dengan jalan pengendalian dalam penggunaan dan kepemilikan tanah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepemilikan dan penggunaan tanah fasos tersebut menjadi lebih jelas. Hal ini dapat menjaga agar fungsi dari tanah yang bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya, dimana kepemilikan lahan tersebut adalah Pemerintah Kota sebagai lembaga yang mengatur tentang penggunaan lahan tersebut.

Rincian rencana kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah Kota Batam tahun 2019 sebagai berikut :

- Input : Rp. 47.600.000,-
- Output : Persentase data lahan Pemerintah Kota Batam hasil inventarisasi 100,00%
- Outcome : Data base hasil pengukuran dan inventarisasi lahan aset Pemerintah Kota Batam 100.00%
- Benefit : Tersedianya data-data pendukung dalam perencanaan penggunaan lahan
- Impact : Tertib administrasi pertanahan serta memudahkan dalam pemanfaatan lahan

c. Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat

Kegiatan ini merupakan usulan masyarakat di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Batam.

Rangkaian kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat pada tahun 2019 adalah (1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme dari PRODA, (2) Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan lokus, (3) Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PRODA, (4) Inventarisasi lahan masyarakat dengan melibatkan pihak konsultasi, (5) bersama2 dengan Kantor Pertanahan

Kota Batam (BPN) melakukan survey dan pengukuran lokasi PRODA, dan (6) Pendaftaran berkas PRODA ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

Rincian rencana kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat tahun 2019 sebagai berikut :

Input	:	Rp. 107.900.000,-
Output	:	Jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat 100 Persil
Outcome	:	Persentase pengadaan dokumen lahan masyarakat 60,00 persen
Benefit	:	Tertib administrasi pertanahan
Impact	:	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

d. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Melalui kegiatan penataan lahan kampung tua ini diharapkan tercapainya kesepakatan luasan 7 kampung tua Kota Batam dan diterbitkan PL nya oleh BP Batam, serta mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat kampung tua dalam mengakses sarana dan prasarana yang memadai, serta lebih jauh diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kampung tua.

Rangkaian kegiatan penataan lahan kampung tua tahun 2019 adalah (1) Koordinasi dan sinkronisasi dengan BP Batam dan RKWB mengenai data-data luasan dan kesepakatan terkait kampung tua, (2) Rapat dan sosialisasi kepada masyarakat kampung tua mengenai rencana pengusulan dokumen PL kampung tua atas nama Pemko Batam, (3) Sosialisasi mengenai kebijakan dan tindak lanjut pengembangan kampung tua Kota Batam dengan peserta seluruh stakeholders, (4) Pengusulan dokumen PL Kampung Tua ke BP Batam.

Rincian rencana kegiatan penataan lahan kampung tua tahun 2019 sebagai berikut :

- Input : Rp. 0,-
- Output : Jumlah dokumen PL Kampung Tua di 7 Kampung
- Outcome : Persentase penyelesaian dokumen PL Kampung Tua sebesar 44,12%
- Benefit : Memudahkan masyarakat dalam mengakses sarana dan prasarana yang memadai
- Impact : Peningkatan perekonomian masyarakat kampung tua

e. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam

Kegiatan pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana prasarana di Kota Batam, sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 sebanyak 50 persil lahan untuk pembangunan, sekolah, puskesmas/puskesmas pembantu, kantor dinas/instansi pemerintah kota, rusunawa, pemakaman, tps, dan lain-lain.

Rangkaian kegiatan pengadaan lahan aset Pemko Batam pada tahun 2019 adalah (1) Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan, dll terkait dengan kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah, (2) Koordinasi dengan BP Batam terkait pengalokasian atas kebutuhan lahan aset Pemko Batam, (3) Survey dan Pengukuran Lapangan, (4) Pengusulan pengadaan lahan aset ke BP Batam.

Rincian rencana kegiatan pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam tahun 2019 sebagai berikut :

- Input : Rp. 49.400.000,-
- Output : Jumlah pengadaan lahan aset Pemko Batam 10 persil
- Outcome : Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam 46,00%
- Benefit : Memudahkan dalam pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Kota Batam
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja bahan/peralatan pakai habis, belanja bahan dan material, belanja jasa kantor, belanja cetak, penggandaan dan dokumendasi, belanja perjalanan dinas, belanja pajak, retribusi dan iuran lainnya.

Rincian kegiatan sebagai berikut :

- Input : Rp. 471.115.662,82
- Output : Tersedianya sarana administrasi perkantoran.
- Outcome : Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.
- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, belanja pemeliharaan gedung. Rincian kegiatan sebagai berikut :

- Input : Rp. 112.029.475,-
- Output : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
- Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman.

Tabel 4.1.1. Rancangan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun 2019

SASARAN			KEGIATAN						KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatnya peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	35,00%	Penataan Tata Guna Tanah	Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah	Capaian Program : : Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal Masukan : : Dana Keluaran : : Jumlah dokumen PL/sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam Hasil : : Persentase pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam	persentase Rp persil persentase	64,87% 68.000.000,00 20 33,81%		
			Penataan Tata Guna Tanah	Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Capaian Program : : Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal Masukan : : Dana Keluaran : : Persentase data lahan Pemerintah Kota Batam hasil inventarisasi Hasil : : Database Hasil Pengukuran dan Inventarisasi Lahan Aset Pemko Batam	persentase Rp persentase persentase	64,87% 47.600.000,00 100% 100% 100%		
			Penataan Tata Guna Tanah	Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Capaian Program : : Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam Masukan : : Dana Keluaran : : Jumlah pengadaan lahan aset Pemko Batam Hasil : : Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	persentase Rp persil persentase	46,00% 49.400.000,00 10 46,00%		

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Penataan Tata Guna Tanah	Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat	Capaian Program : Masukan : Keluaran :	: Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal : Dana : Jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat	persentase Rp persil	64,87% 107.900.000,00 100	
			Penataan Tata Guna Tanah	Penataan Lahan Kampung tua	Capaian Program : Masukan : Keluaran :	: Persentase pengadaan dokumen sertifikat lahan masyarakat : Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal : Dana : Dokumen PL Kampung Tua	Kampung Tua Rp kampung tua persentase	64,87% 0,00 7 44,12%	
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Opini BPK	WTP	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Masukan : Keluaran : Hasil :	: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran : Dana : Tersedianya sarana administrasi perkantoran : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur	Tahun Rp Tahun persentase	5 471.115.662,82 1 100,00%	

SASARAN			PROGRAM		KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya sarana presarana aparatur	Tahun Rp Tahun	5 112.029.475,00 1	
					Hasil : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur	persentase	100,00%	



B A B V

P E N U T U P

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan pada Bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2019 Dinas Pertanahan Kota Batam disusun sebagai wujud dukungan kepada Pemerintah Kota Batam di bidang pertanahan akan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dalam menyikapi perkembangan Kota Batam saat ini, maka perlu diambil langkah-langkah strategis agar tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Renja Kerja (Renja) Dinas Pertanahan. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Mempersiapkan Dinas Pertanahan Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
2. Melakukan koordinasi internal untuk evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2017 sehingga menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2018;
3. Mengambil dan menetapkan kebijakan yang dapat mendukung program kerja Walikota Batam di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kota Batam;
4. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah strategis dimasa datang berdasarkan evaluasi kerja tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018;

5. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi vertikal seperti kantor Pertanahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk perencanaan penatagunaan lahan di Kota Batam umumnya serta Rempang dan Galang pada khususnya;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim petugas teknis dan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. Penambahan dan penempatan tenaga teknis sesuai dengan latar belakang pendidikan teknis guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas dinas.

Demikian Rancangan Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019 ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Batam, Desember 2018

KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM,



ASPAWI NANGALI, S.Sos

Pembina TK I NIP. 19640509 198603 1 015